

BAB III

TERORISME DI INDONESIA

Terorisme dan islam adalah ibarat pancing dan kail yaitu saling berkaitan satu sama lain. Dengan penduduk yang berjumlah 260 juta dan 87,2% adalah muslim menjadikan islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.¹ Melimpahnya jumlah populasi umat islam di Indonesia tidak lantas diikuti dengan kesatuan dan persatuan umat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam organisasi dan aliran dengan corak islam yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia melalui undang – undang memang mengizinkan warganya mendirikan organisasi dengan corak islam namun dengan syarat harus menggunakan Pancasila sebagai landasan ideologinya. Hal ini termaktub dalam UU Nomor 17 tahun 2013 yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).²

Akar dari aksi ekstremisme di Indonesia dapat dilacak sejak Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Pendirian negara demokrasi dengan ideologi Pancasila rupanya ditolak oleh seorang tokoh nasional yang juga seorang sahabat Soekarno yaitu Kartosuwiryo. Kemudian terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan cara mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 4

¹ World Fact Book: Indonesia, Central Intelligence Agency, (<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/id.html>; diakses tanggal 26 Juli 2018)

² Indah Mutiara Kami, *Sah Jadi UU Ini Isi Lengkap Perppu Ormas*, (<https://news.detik.com/berita/3698291/sah-jadi-uu-ini-isi-lengkap-perppu-ormas> diakses 28 Agustus 2018)

Juli 1949.³ Cita – cita Kartosuwiryo untuk mendirikan negara dengan ideologi islam dan menolak ideologi Pancasila hingga kini belum pudar. Hal ini berdasarkan dari munculnya organisasi – organisasi dan tokoh – tokoh yang juga berkeinginan agar negara Indonesia menjadi negara islam. Organisasi tersebut bahkan kemudian melahirkan aktor – aktor yang banyak menjadi dalang dari serangkaian aksi terorisme di Indonesia seperti Jama'ah Islamiyah yang juga memiliki koneksi dengan Al – Qaeda.⁴ Keinginan tersebut semakin diperkuat oleh kemunculan organisasi ekstremisme internasional seperti *Islamic State* (IS) yang juga memiliki cita – cita mendirikan kekhalifahan islam di dunia namun menggunakan cara – cara yang tidak islami.

A. Sejarah Kontemporer Terorisme di Indonesia

Dengan jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menghadapi kekerasan komunal dan main hakim sendiri yang luas di banyak wilayah — Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara, ditambah dengan gerakan separatis di Aceh dan Timor - timor. Efek kumulatif dan urgensi mendesak dari Konflik-konflik ini, yang bertanggung jawab atas ribuan kematian, kerusakan infrastruktur, dan pergolakan umum, menutupi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok jihadis transnasional selama jangka waktu ini.⁵

³ Suaib Tahir, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, BNPT, Jakarta, 2016. Hal 20

⁴ Fransisco Galamas, *Terrorism In Indonesia: An Overview*, IEEE, 2015

⁵ Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*, Cambridge University Press, California, 2015. h.214-217

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti insiden-insiden yang tidak menargetkan pemerintah sebagai perilaku kriminal normal yang mengandung sedikit substansi dan percaya bahwa masalah terorisme tidak bukan suatu ancaman serius bagi negara.⁶ Sifat rumit dari Islam radikal Indonesia (keterkaitan kelompok-kelompok radikal yang keras dan tanpa kekerasan), serangan-serangan 9 / 11, dan tekanan AS berikutnya untuk berbuat lebih banyak (mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal Indonesia sebagai teroris dan menyerukan pembubaran mereka oleh Indonesia) masih tidak menimbulkan kekhawatiran besar dan dipandang dengan skeptisisme umum oleh pihak berwenang Indonesia dan masyarakat luas⁷. Pada periode ini kekerasan antar agama dan masyarakat sedang marak terjadi di Indonesia.

Pada bulan Agustus 2000, Presiden Indonesia saat itu Abdurrahman Wahid berbicara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menyatakan bahwa Gelombang disintegrasi mengancam keberadaan negara kesatuan dan persatuan nasional.⁸ Ketika rezim Suharto jatuh pada tahun 1998 dan selama tahun-tahun ke depan naiknya negara menuju pemerintahan yang demokratis, Indonesia menghadapi segudang tekanan domestik yang beragam dan meluas yang akan menjadi ancaman signifikan terhadap kedaulatan dan integritas nasional. Dua ancaman utama akan muncul selama

⁶ Sidney Jones, *Indonesian Government Approaches to Radical Islam since 1998*, Columbia University Press, New York, 2013, hal:120

⁷ Kirk Johnson, *The Longue Duree: Indonesia's Response To The Threat Of Jihadist Terrorism 1998–2016*, NPA, California, 2016, hal: 10

⁸ Michael Malley, *Indonesia: The Erosion of State Capacity*, Brookings Institution Press, Washington DC, 2003, hal: 191–92.

jangka waktu ini didasarkan pada peningkatan yang tiba-tiba dan tajam dari penggunaan kekerasan politik oleh aktor domestik. Yang pertama terdiri dari peningkatan sentimen publik provinsi yang mendukung aksi politik melalui cara-cara kekerasan dan non-kekerasan untuk gerakan separatis baru dan yang telah berusia puluhan tahun di berbagai bidang seperti Timor Timur, Ambon, Aceh, dan Papua. Yang kedua akan dikaitkan dengan meluasnya gelombang kekerasan massal yang meletus antara orang Kristen dan Muslim, dan kemunculan laskar – laskar islam.

Gerakan separatis bersenjata dan konflik komunal dan laskar yang digerakkan akan bertanggung jawab atas kematian sekitar 22.000 warga sipil dan kombatan, hampir dua juta orang terlantar, kerusakan infrastruktur yang tak terhitung, dan pergolakan umum di seluruh negeri.⁹ Efek kumulatif dan tekanan urgensi politik dari dua sumber utama konflik tidak hanya akan mengalihkan perhatian negara, tetapi juga menyerukan alokasi sumber daya yang terbatas dan kapasitas terbatas. Lebih jauh lagi, tekanan-tekanan domestik gabungan ini menutupi ancaman terhadap keamanan nasional dan selanjutnya memungkinkan kondisi untuk peningkatan mobilisasi kelompok-kelompok jihadis domestik dan transnasional selama jangka waktu ini dan mengikuti ditahun-tahun berikutnya.

Lengsernya kekuasaan Soeharto yang cepat dan gejala politik berikutnya yang diperparah oleh

⁹ Edward Aspinall, *How Indonesia Survived: Comparative Perspectives on State Disintegration and Democratic Integration*, Columbia Univ. Press, New York, 2013, hal:125

lembaga-lembaga negara sipil yang lemah memberikan banyak ruang bagi gerakan di banyak provinsi dengan keinginan lama untuk otonomi atau kemerdekaan untuk membuat tawaran mereka sekali lagi.¹⁰ Beberapa gerakan ini telah berlangsung lama seperti yang terjadi di Timor Timur, Aceh, dan Papua (Irian Jaya) sementara yang lain melihat sentimen-sentimen ini mendapatkan ‘angin segar’ di daerah seperti Riau dan Ambon.¹¹ Pemicu sentiment separatis baik gerakan baru maupun lama di provinsi-provinsi adalah keluhan yang didasarkan atas eksploitasi sumber daya alam dan kurangnya perlakuan yang adil secara ekonomi dan politik oleh pemerintah pusat.¹² Timor Timur akan menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang menerima kemerdekaan langsung dari Indonesia setelah desakan dan bantuan dari komunitas internasional digabungkan dengan referendum yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999 yang melihat 78% pemilih Timor Leste untuk kemerdekaan. Kemerdekaan Timor Leste didapatkan dengan biaya yang tinggi dan pengorban dari para pejuang TNI, pro Indonesia, dan pro kemerdekaan yaitu sebanyak 2000 orang tewas.¹³ Tidak ingin daerahnya kembali lepas, rakyat Indonesia dan Pemerintah berjuang sekuat tenaga demi mempertahankan kedaulatan negaranya.

Sentimen separatis di Aceh menginginkan berdirinya Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII), pemberontakan tahun 1948 – 1962 dimana para

¹⁰ Michael Malley, *opcit*, hal: 195

¹¹ Kirk Johnson, *opcit*, hal: 11

¹² Edward Aspinnall, *opcit*, hal: 127

¹³ Michael Malley, *opcit*, hal: 196-197

pemberontak Aceh saat itu bergabung dengan Kartosuwiryo melawan Soekarno dengan demokarisnya.¹⁴ Koneksi otonom diberikan kepada wilayah oleh Republik kemudian hanya akan memperkuat keinginan untuk merdeka di tahun-tahun mendatang. Sejak akhir tahun 1976, gerakan ini mengambil perjuangan bersenjata melalui pembentukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).¹⁵ Melalui penggunaan kekuatan brutal, Suharto memobilisasi militer Indonesia dan menjadikan Aceh sebagai zona militer. Dengan sekitar 12.000 tentara, militer Indonesia mampu mengurangi dampak GAM tetapi bukannya tanpa biaya ribuan jiwa sipil dalam proses. Pada malam keberangkatan Soeharto pada tahun 1998, penemuan kuburan massal memunculkan kembali kebencian yang terfokus di Jakarta. Kebencian ini dimanifestasikan ke dalam perekrutan dan dukungan lebih lanjut untuk GAM — mencapai sebanyak 10.000 anggota — serta pembentukan kelompok aktivis non-kekerasan berbasis universitas, Pusat Informasi Referendum Aceh (SIRA) pada 1999.¹⁶ Pada tahun yang sama, SIRA akan melanjutkan untuk mengorganisir demonstrasi massa dengan lebih dari 1 juta dari 4 juta penduduk provinsi. Selama jangka waktu ini, penggunaan taktik gerilya dan terorisme oleh GAM memungkinkan mereka untuk mendominasi daerah pedesaan sementara Tentara Indonesia menguasai pusat-pusat perkotaan utama —

¹⁴ Solahudin, *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, terj. Dave McCrae, : Cornell University Press, New York, 2013, hlm: 38–39

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Michael Malley, *opcit*, hal: 198

situasi yang serupa dengan yang dialami selama pemberontakan DI lebih dari tiga dekade sebelumnya.¹⁷

Pada tahun 2000, gencatan senjata ditengahi antara pemerintah dan pimpinan GAM namun pertempuran berlanjut secara sporadis.¹⁸ Dari tahun 1998 hingga 2001, eskalasi gerakan dan pertempuran mendekati hilangnya hampir 3.000 jiwa.¹⁹ Selain itu, GAM menyumbang 33% dari total serangan teroris yang dilakukan terhadap pemerintah Indonesia yang menewaskan 106 jiwa dan melukai 124 jiwa lainnya.²⁰ Ancaman besar kedua terhadap integritas nasional dari negara yang baru mendemokratisasi adalah munculnya kekerasan komunal yang terjadi di daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan, Maluku, dan Maluku Utara.²¹

Pola serangan teroris JI setelah Bali-I, JI akan dengan keras mengklaim keinginannya untuk menargetkan "*far enemy*" yang terdiri dari institusi atau simbol barat dan turis asing serta target "*near enemy*" seperti umat Katolik setempat. Dengan penangkapan dan persidangan Imam Sumadra, salah satu mastermind Bom Bali I, pembenaran ini ditegaskan kembali secara publik di dalam penahanan Samudra ketika dia menyatakan bahwa sasaran diwakili, "Tempat berkumpulnya teroris internasional - yaitu, Israel / Yahudi, Amerika, Australia

¹⁷ Edward Aspinall, *opcit*, hal: 135

¹⁸ Kirk Johnson, *opcit*

¹⁹ Michael Malley, *opcit*, hal: 200 - 201

²⁰ National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), 2016)

²¹ Adrian Vickers, *opcit*, hal: 214 - 217

dan negara-negara lain yang terlibat dalam penghancuran Afghanistan selama Ramadhan 2001.

Serangan Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 membuat pemerintah Indonesia melihat bahwa serangan teroris merupakan suatu ancaman yang patut diperhatikan. Tewanya 200 orang dan membuat 300 orang terluka bukanlah suatu kejadian yang dapat dianggap enteng. Pelaku bom tersebut kemudian mengarah kepada jaringan Jama'ah Islamiyah atau JI, sebuah organisasi yang memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris global yaitu Al – Qaeda yang kemudian memungkinkan pemerintah mendapatkan bantuan dan mengalokasikan sumber daya untuk meresponnya.²²

Merespon terjadinya aksi tersebut, pemerintah Megawati kala itu kemudian menerbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tragedi Bom Bali I kemudian diikuti dengan Bom Hotel J W Marriott tahun 2003, Kedutaan Australia tahun 2005, dan Bom Bali tahun 2005. Serangkaian aksi bom yang terjadi menjadi alasan diterbitkannya perpu dan kemudian disahkan menjadi undang – undang guna menindak para pelaku terorisme. Undang – undang tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menindak pelaku terorisme.²³

Setelah pemboman sebelumnya dan setelah pemboman Bali kedua pada tahun 2005 (Bali-II), sentimen publik sangat berbalik melawan teroris lagi.

²² Kirk Johnson, *opcit.*

²³ *Ibid*

Pergantian pendapat ini membuka pintu bagi pihak berwenang Indonesia — bersamaan dengan dukungan kontra terorisme dari pemerintah AS dan Australia — untuk semakin meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain diterbitkannya payung hukum berupa undang – undang, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan AS membentuk unit kesatuan polisi yang bertugas khusus dalam menindak pelaku terorisme. Unit tersebut adalah Detasemen Khusus 88 atau Densus 88. Densus 88 adalah mekanisme yang digunakan oleh POLRI untuk mengelola rencana dan kebijakan kontraterorisme, mengatur pelatihan, dan menangani pendanaan serta mengerahkan tim-tim kontra-teroris di seluruh negara.²⁴

POLRI juga membentuk Satgas Anti-teror dan Bom (ATB) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. ATB terdiri dari personil polisi terbaik yang memiliki hubungan dengan polisi asing. KAPOLRI juga mendirikan unit polisi lain untuk menangani upaya-upaya kontra-terorisme. Badan ini menjadi inti dari Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang secara resmi didirikan pada tahun 2004. Institusi kedua adalah lembaga intelijen. Indonesia memiliki tiga badan intelijen utama, Badan Intelijen Nasional (BIN, Badan Intelijen Negara), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, dan intelijen Polisi Nasional, ditambah unsur-unsur intelijen di Kementerian Kehakiman, Departemen Keuangan, dan juga melalui PPTAK. Untuk tujuan ini, dimulai pada tahun 2002 undang-undang baru akan disusun dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) ditugaskan secara khusus untuk pemantauan dan penegakan anti-pencucian uang dan

²⁴ *Ibid*

regulasi kontra pembiayaan terorisme. Namun, masalahnya adalah bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi secara independen satu sama lain dan tidak berfungsi sebagai "komunitas intelijen" klasik.²⁵

Dua tema dapat dilihat dalam ancaman tunggal yang ditimbulkan oleh terorisme transnasional jihad dalam jangka waktu ini. Pertama, kelompok-kelompok radikal jihadis domestik akan bertahan dengan aksi-aksi kekerasan teror ke dalam dan sepanjang rentang waktu ini dari 2009-2016, yang dilihat melalui al-Qaeda Noordin Top untuk Kepulauan Melayu (AQA) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso. Kedua, bangkitnya perang sipil di Suriah dan Irak antara 2011 – 2013 dan munculnya faksi jihadis yang saling terkait secara internasional dengan Al – Qaeda yaitu Al – Nusra Front dan *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS yang kemudian menjadi *Islamic State* atau IS pada tahun 2014 - akan melihat peremajaan pengaruh kelompok teroris transnasional di banyak bagian dunia. Mengenai Indonesia, IS akan memperluas strategi globalnya ke jaringan lebih lanjut, memasukkan ke dalam desain global mereka, dan mengembangkan kelompok jihadis domestik yang aktif.²⁶

Bersama kedua tema ini, jangka waktu ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian berbeda dengan berbagai cara, cara, dan sifat dari keseluruhan ancaman yang diajukan para jihadis kepada negara. Yang pertama akan

²⁵ Ali Muhammad, *Indonesia's Way To Counter Terrorism 2002—2009: Lesson Learned*, *Journal of Government and Politics* Vol.5 No.2, 2014, hal: 192.

²⁶ Kirk Johnson, *opcit*

dimulai dengan tindakan dan ketahanan kelompok-kelompok radikal dalam negeri seperti JI, JAT, Top AQA, lintas Tanzim, dan kemudian MIT yang dipimpin oleh Santoso, yang melakukan apa yang Jones dan IPAC dijuluki, "*Low-tech dan low-casualty*," - Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya - serangan berbasis balas dendam terhadap simbol-simbol POLRI dan pemerintah dari tahun 2009 hingga 2012 dan seterusnya.²⁷

Pada Juli 2009, sebuah serangan kompleks yang terdiri dari dua bom bunuh diri terpisah di hotel Marriot dan Ritz Carlton di pusat distrik bisnis Jakarta yang mengakibatkan kematian 9 orang dan lebih dari 50 orang terluka, mengguncang negara itu dari jatuhnya "jihad". Pihak berwenang dengan cepat mengetahui bahwa Top telah sekali lagi mengatur, merencanakan, dan melakukan serangan dengan mantan anggota JI dan elemen berbeda dari kelompok sempalan jihadis yang tersebar di seluruh kepulauan. Pada bulan Juni tahun itu, operasi besar kedua yang direncanakan gagal ketika rencana untuk membunuh SBY diungkap dan digagalkan oleh POLRI dan Densus-88. Dengan pihak berwenang sekarang dalam pengejaran dan selama melakukan berbagai serangan, para pemimpin AQA akan terbunuh dalam tembak-menembak dengan POLRI dan Densus-88 yang mengakibatkan TOP terbunuh pada September 2009 dan Dulmatin pada Maret 2010.

²⁷ IPAC, "*Violent Extremism*", Institute For Policy Analysis of Conflict (<http://www.understandingconflict.org/en/conflict/index/4/Violent-Extremism> diakses tanggal 17 Agustus 2018)

Munculnya perang saudara Suriah dan munculnya IS akan menghidupkan kembali ideologi jihad transnasional yang akan mengubah ruang lingkup ancaman jihadis Indonesia. Pertama, karena benih untuk peremajaan seperti itu telah diletakkan dan dipelihara dengan keinginan yang terus menerus untuk fokus pada musuh “dekat” dan “jauh” melalui cara-cara kekerasan oleh banyak kelompok jihadis Indonesia domestik dari tahun 2009 – 2012.

Bersama-sama, faktor-faktor ini akan menimbulkan tiga ancaman utama bagi Indonesia: Pertama, kebangkitan kembali penyatuan dan solidaritas kelompok jihadis domestik melalui pernyataan IS atau baiat, dukungan atau kesetiaan. Kedua, jumlah *foreign fighters* Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya - dilaporkan berpotensi mencapai 800 orang (meskipun mungkin sekitar 500–600 orang yang dihadang oleh pihak berwenang, terbunuh dalam aksi tempur, atau pulang) - telah ditarik ke wilayah tersebut membawa ancaman yang unik. Akhirnya, faktor ketiga terletak pada keinginan IS untuk memperluas jangkauannya dengan penggabungan wilayah Asia Tenggara, disponsori dan berafiliasi dengan provinsi, berpotensi di Sulawesi atau ke utara langsung di pulau tetangga dari Filipina barat daya.

Konflik Suriah telah berfungsi untuk secara bersamaan menggembelng dan menyatukan kelompok-kelompok jihadis domestik yang berbeda di sepanjang dua front. Jihadis individu dan kelompok jihadis radikal akan dipaksa untuk menyelaraskan afiliasi mereka dan janji bai'at baik kepada ANF AQ atau IS dengan tidak ada kelompok yang memegang kendali penuh atas para

jihadis Indonesia. Ji tepat, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Anshorul Syariat (JAS) - sebuah cabang militan yang melahirkan dari JAT dengan putra-putra Ba'asyir (Abdul Rahim dan Abdul Roshid) karena janji Ba'asyir kepada IS - terus mempertahankan keselarasan tradisional dukungan dan upaya untuk AQ dan ANF.³²² Sementara pendukung kuat fundamentalisme Islam dan penggunaan jihad bersenjata untuk mencapai tujuannya, kelompok-kelompok ini tidak setuju dengan ideologi, cara, dan cara IS - pembunuhan massal Muslim dan non kafir yang tidak bersalah. —Tidak melihat IS sebagai Kekhalifahan yang berinkarnasi dan tereinkarnasi di bawah kepemimpinan Ibrahim al-Baghdadi.

Serangan yang terjadi di kawasan Sarinah di jalan M.H Thamrin pada 14 Januari 2016 di pusat kota Jakarta menjadi panggung bagi para teroris untuk menunjukkan eksistensi mereka setelah cukup lama vakum. Pada peristiwa bom Thamrin ini menewaskan 8 orang dan 24 orang mengalami luka – luka. Kemudian terjadi bom yang meledak di Terminal Bus Kampung Melayu di Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2017 yang menewaskan 5 orang polisi dan melukai 10 orang. Dan yang terbaru adalah ledakan di depan tiga gereja besar di Kota Surabaya di Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Ledakan terjadi di depan Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Utara No.1, Baratajaya, Gubeng. Sementara dua gereja lain yang juga mengalami ledakan adalah GKI Diponegoro Surabaya, dan GPPS Sawahan di Jalan Arjuno yang menimbulkan 10 orang korban jiwa serta 41 orang korban luka.

B. Sebab Terorisme di Indonesia

Tindakan terorisme terjadi karena berbagai faktor. Beberapa faktor diidentifikasi sebagai penyebab munculnya tindakan terorisme yang juga terjadi di Indonesia. Diantaranya adalah faktor ideologi, psikologi, ekonomi, dan budaya²⁸

- a. Faktor Ideologi dan Fanatisme Terhadap Agama
Para pelaku teror atau biasa disebut jihadis di Indonesia melakukan aksi teror dengan cara meledakkan Bom di tempat tertentu termotivasi salah satunya karena menurut pemahaman mereka adalah salah satu jalan menuju surga. Menafsirkan islam sesuai dengan kebutuhan mereka dan memakai ayat sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan bahkan pembunuhan bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Pelaku teror atau biasa disebut jihadis ini mengistilahkan tindakan mereka sebagai ‘jihad’ atau membela agama islam dengan cara berperang. Bahkan berdasarkan riset *Indonesian Institute for Society Empowerment* (INSEP) tahun 2012 menyebutkan bahwa 45 persen motif aksi teror adalah ideologi agama.²⁹

Komentator Barat sering menggunakan — atau penyalahgunaan — istilah-istilah yang diambil dari agama Kristen dan menerapkannya pada Islam. Salah satu yang paling umum digunakan adalah

²⁸ Club de Madrid, *Addressing the Causes of Terrorism*, Club de Madrid, 2015, hal: 5

²⁹ Yohanes Enggar: Lawan Terorisme BNPT Berikan Pembekalan Mahasiswa Baru, Kompas.com, (<https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/14/23330431/lawan-terorisme-bnpt-berikan-pembekalan-mahasiswa-baru-its> diakses 23 Agustus 2018)

fundamentalisme. Seperti yang kita ketahui, dalam penerapan aslinya itu berarti seseorang yang percaya pada dasar-dasar agama, yaitu Alkitab dan tulisan suci. Dalam arti itu setiap Muslim adalah fundamentalis yang percaya pada Al-Qur'an dan Nabi. Namun, cara yang digunakan di media, berarti fanatik atau ekstremis, itu tidak menerangi pemikiran Muslim atau masyarakat Muslim. Fundamentalis adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1920 untuk merujuk kepada kelompok konservatif yang paling religius dalam agama Kristen.

Dalam Yudaisme, Islam dan agama-agama lain, istilah ini digunakan untuk merujuk pada sayap konservatif ekstrem yang dikenali oleh Karen Armstrong sebagai "bentuk-bentuk spiritualitas yang diperangi," yang telah muncul sebagai respon terhadap krisis yang dirasakan — yaitu ketakutan bahwa modernitas akan mengikis atau bahkan membasmi iman dan moralitas mereka. Dalam konteks Kristen, ini adalah konsep yang bermanfaat. Dalam konteks Muslim itu hanya membingungkan karena menurut definisi setiap Muslim percaya pada dasar-dasar Islam. Tetapi bahkan umat Islam berbeda dalam ide-ide mereka tentang bagaimana, dan sejauh mana, untuk menerapkan ide-ide Islam ke dunia modern.

Arus utama Sunni Islam mungkin adalah bentuk yang paling luas, toleran dan tentu saja yang memiliki jumlah pengikut terbesar — hampir sembilan puluh persen Muslim adalah Sunni. Namun, pemikiran Wahhābī dalam Sunni percaya pada interpretasi harfiah dari Al-Qur'an. Ini

mendominasi Arab Saudi, yang memiliki populasi kecil sekitar sepuluh juta tetapi pengaruh besar karena pendapatan minyaknya dan sebagai penjaga kota suci Mekah dan Madinah. Pemikiran ini akan menginterpretasikan semuanya dalam Al-Qur'an secara harfiah: dengan demikian memotong tangan, kematian karena perzinahan, dan sebagainya

Para Islamis Sunni — baik militan maupun damai — percaya bahwa salah satu tujuan utama mereka adalah memurnikan agama Islam dari segala kenajisan, seperti pemikiran dan nilai Barat dari luar dan inovasi dan interpretasi pasca-Nabi dari dalam. Memang, banyak yang melihat ancaman dari orang-orang Muslim yang tidak murni dari masa lalu dan masa depan yang membutuhkan lebih banyak perhatian. Untuk para militan, kita dapat melihat bahwa serangan teroris melayani tiga tujuan: mereka mengurangi pendapatan rezim murtad, mereka mengusir dan membunuh orang asing dan kafir juga mereka menghukum umat Islam yang tidak hidup sesuai dengan syariah. Untuk Islamis non-kekerasan, pemurnian Islam sangat penting untuk tujuan mereka. Seperti kaum militan, mereka tidak percaya bahwa Islam dapat memperoleh kembali puncaknya selama ia dikuasai oleh Barat yang sekuler.

Keinginan untuk kembali memurnikan ajaran Islam ini disebut juga sebagai Salafisme yang mengacu pada gerakan memurnikan dalam Islam yaitu berusaha kembali ke filsafat agama salaf as-shalih - tiga generasi pertama dari komunitas Islam setelah berdirinya Islam oleh Nabi Muhammad. Dalam salafi ini terdapat istilah salafi jihadis yang salah seorang tokohnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu

Taimiyah menampilkan dirinya sebagai pembela sejati dari Sunni Islam ortodoks. Dia mengundang umat Islam untuk kembali ke Qu'ran dan Sunnah Nabi (jalan dan praktiknya). Dia menekankan kemurnian Islam yang tidak terkontaminasi oleh berbagai inovasi. Sebagai penganut aliran yurisprudensi Islam Hambali, dia menentang pandangan yang dipegang oleh beberapa ulama Islam di zamannya bahwa metode rasional seperti filsafat diperlukan untuk memahami iman Islam. Ibnu Taimiyah menganggap ini sama dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak memahami ayat-ayat Al Qur'an yang diturunkan kepadanya oleh Allah. Dalam pandangannya, ajaran iman harus berasal dari Quran dan hadits yang berwibawa (ucapan Nabi), bukan dari logika.

Selain itu peran dari pemahaman kelompok khawarij yang menggunakan cara – cara kekerasan dalam menegakkan islam. Bagi mereka islam adalah jihad dan jihad adalah dengan cara pembunuhan, teror, dan perang. Walaupun secara institusi khawarij telah musnah, namun pengaruh dan corak keberislaman kelompok ini masih sering diadopsi dan dipraktikkan oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan umat islam yang menggunakan jalan perang dan memusuhi bahkan membunuh umat islam yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.³⁰

³⁰ Muhammad Haidar Assad, *ISIS Organisasi Paling Mengerikan Abad Ini*, Jakarta Selatan, Zahira, 2014, hal: 119

b. Faktor Psikologi

Terdapat ciri – ciri terorisme yang disepakati oleh para ahli yang membedakan terorisme dengan kejahatan kriminal biasa, yaitu: Pertama, terdapat tujuan yang jelas dan terencana dalam terorisme. Artinya, teror yang dilakukan bukan sebagai tujuan utama tetapi ada maksud dan tujuan yang sesungguhnya di balik perilaku teror yang dilakukan.

Kedua, motivasi terorisme bisa bersifat patologis tetapi bisa juga bersifat politik, walaupun para teroris umumnya adalah kumpulan orang-orang yang normal yang sama sekali jauh dari karakteristik abnormal atau patologis dalam kesimpulan penelitian terbaru yang dilakukan oleh sejumlah psikiater dan psikolog. Ketiga, ditujukan kepada khalayak atau massa dengan jumlah yang banyak. Alasan utamanya adalah karena pesan akan lebih cepat tersampaikan dengan banyaknya massa dan khalayak yang berkumpul. Keempat, perubahan sosial dan politik adalah tujuan utama dalam melakukan tindakan. Kelima, terorisme melibatkan suatu kelompok atau organisasi yang terdiri dari para pemimpin dan para pengikut.

Ada lima rantai menuju terorisme, yaitu : Pertama yaitu rantai dasar. Pada rantai dasar ini terdapat interpretasi psikologis tentang kondisi materil, persepsi terhadap kejujuran dan adekuasi identitas. Kedua yaitu rantai pertama. Pada tahap ini adalah mencari cara untuk meningkatkan kondisi yang dipengaruhi oleh peluang mobilitas dan suara individual. Ketiga yaitu rantai kedua. Pada tahap ini adalah pengaruh pesan persuasif yang menyatakan

bahwa akar persoalan mereka adalah musuh luar yang dipimpin Amerika. Keempat yaitu rantai ketiga. Pada tahap ini adalah mulai menganut moralitas yang mendukung terorisme; mereka mulai terpisah dari moralitas mainstream umat Islam. Mereka mulai menganut moralitas “*the end justify the mean*”. Kelima, rantai keempat. Pada tahap ini adalah menganut gaya berpikir *us vs them* kita lawan mereka, kebaikan melawan kejahatan, hitam dan putih. Muncul legitimasi psikologis untuk menyerang kekuatan-kekuatan setan dengan segala cara. Keenam, rantai kelima. Pada tahap ini adalah mengambil peran secara langsung mendukung aksi terorisme.

c. Faktor Ekonomi

Terorisme berkembang di lingkungan yang penuh keputusan, penghinaan, kemiskinan, penindasan politik, ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia; ia juga berkembang dalam konteks konflik regional dan pendudukan asing; dan ia mendapat keuntungan dari kapasitas negara yang lemah untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.³¹ Dengan keterbatasan negara dalam memakmurkan rakyatnya terdapat celah bagi jaringan kelompok terorisme dalam merekrut anggotanya.

³¹ United Nations Reports of the Secretart General’s High Level Panel on Threats, Challenge and Change (2004), diakses pada tanggal 12 Agustus 2017 dari <http://www.un.org/secureworldreport2.pdf>, hal. 2.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Djelantik, ketidakpastian ekonomi dan tingkat ekonomi yang pas – pasan di dalam negeri membuat masyarakat ingin mencari penghidupan yang lebih layak diantaranya adalah dengan cara menjadi Tenaga Kerja Luar Negeri atau TKI. Menjadi seorang TKI pun bukan sesuatu yang gratis, dibutuhkan biaya dari membayar kepada seorang agen dan biaya – biaya lainnya. Hal ini yang membuat menjadi seorang ‘Jihadis’ adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.³²

Seperti yang dilakukan oleh Islamic State atau IS yang mengiming – imingi siapa saja yang bersedia bergabung akan mendapatkan gaji yang besar dan hidup yang berkecukupan. Para pengangguran dan orang – orang yang putus asa menjadi ‘korban’ dari ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyatnya tentunya akan tergiur dengan tawaran tersebut. Bagi sebagian orang yang tertarik untuk bergabung, angan – angan untuk memiliki kehidupan yang layak dapat mereka capai ‘hanya’ dengan cara mereka bergabung dengan kelompok teroris ini.

d. Faktor Budaya

Isu-isu yang telah dikemukakan oleh para ahli yang berpartisipasi dalam kelompok kami berkisar

³² Sukawarsini Djelantik, *Terrorism in Indonesia: The Emergence of West Javanese Terrorists*, International Graduate Student Conference Series No. 22, 2016, hal: 7

pada gagasan bahwa terorisme sering muncul sebagai tanggapan terhadap budaya keterasingan yang didorong oleh konflik budaya daripada sebagai tanggapan terhadap budaya nasional tertentu. Kita dapat memikirkan budaya keterasingan dan penghinaan sebagai semacam medium pertumbuhan di mana proses radikalisasi dimulai dan ekstremisme jahat datang untuk berkembang. Faktor budaya (termasuk keluhan etnis dan agama) cenderung terkait dengan insentif individu, ideologi politik, dan tujuan ekonomi. Narasi dan kenangan sejarah dapat memberi teroris apa yang mereka lihat sebagai alasan dan sebab mereka untuk terlibat dalam kekerasan. Konflik lokal, serta budaya yang lebih luas dalam kelompok agama, atau bahkan antara suku menjadi panggung untuk rekrutmen.

Konflik di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan adalah konflik komunal yang melibatkan identitas kesukuan dan agama. Pertikaian komunal di dalam pulau-pulau Maluku, khususnya di sekitar kota Ambon, akan menjadi salah satu yang paling keras dan berdarah dari semua, dan lebih lanjut menunjukkan kompleksitas politik dan sosial yang unik yang terlibat dalam konflik-konflik ini. Demografi Ambon terdiri dari satu pendukung protestan Kristen, termasuk kantor pemerintahan provinsi, hingga imigrasi Muslim menghasilkan perpecahan yang lebih bahkan.³³

Pada tahun 1999, orang Kristen Kristen Protestan menggembar-gemborkan gagasan pembentukan

³³ Michael Malley, *opcit*, hal: 205

negara Kristen yang terpisah. Belakangan tahun itu, penduduk Kao menyerang, membunuh ratusan dan mengusir 10.000 muslim. Kejadian tersebut kemudian memicu amarah dan sentimen publik. Demonstrasi besar – besaran kemudian tak terelakkan disebabkan sentiment publik tersebut. Diperkirakan 100.000 massa memenuhi Jakarta dan mendeklarasikan *Holy War* atau perang suci.

C. Dampak Terorisme di Indonesia

Tindakan terorisme memiliki dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Akibat dari aksi yang dilakukan oleh para ekstrimis di Indonesia, selain menimbulkan korban jiwa juga menghamburkan energi dan biaya yang tidak sedikit. Serangan teroris pada peristiwa Bom Bali I membuat perekonomian Bali terpuruk. Negara – negara asing yang menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisatanya mengeluarkan ‘travel warning’ kepada para warga negaranya yang ingin berkunjung ke Bali. Tentunya hal ini mempengaruhi perekonomian Bali yang mengandalkan pariwisatanya sebagai sumber pemasukan daerahnya.

Semenjak terjadinya Bom Bali I yang menewaskan banyak turis asing mau tak mau membuat negara luar pun ikut campur . Negara seperti Australia dan Amerika kemudian membantu Indonesia yang secara sumber daya belum cukup mumpuni dalam pemberantasan terorisme. Bantuan tersebut berupa dana yang digunakan untuk pemberantasan terorisme dan bantuan pelatihan aparat yaitu densus 88 yang bertugas menindak pelaku di lapangan.

Penerbitan payung hukum sebagai landasan dalam penindakan terorisme pun dimulai sejak era Megawati yaitu dimulai dari Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2003 hingga kemudian yang terakhir direvisi dan disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. Budaya toleransi yang menjadi nilai – nilai dalam membangun persatuan dan berkehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tak berarti ketika dihadapkan dengan ideologi para terorisme yang berpaham bahwa kebenaran hanyalah milik mereka dan kaum yang sama dengan mereka.

D. Bentuk dan Pola Terorisme di Indonesia

Terorisme memiliki beberapa tipologi yaitu berdasarkan pada tujuan dan ciri juga berdasarkan skala aksi dan organisasinya dibagi menjadi terorisme nasional, internasional dan transnasional.³⁴

Tipe	Tujuan	Ciri – ciri
Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah)	Bermotif politis, dilakukan dengan cara menekan pemerintah dengan tujuan untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal.

³⁴ Budi Hardiman, *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, IMPARSIAL, Jakarta, 2003, hal. 6-7.

Terorisme represif	Menindas individu atau kelompok oposisi yang menjadi musuh penindas yaitu rejim otoriter/ totaliter dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi teror massa, yaitu adanya aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga dan kalangan rakyat, memunculkan paranoia pemimpin.
--------------------	---	--

Skala	Ciri – ciri
Terorisme intra-nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu
Terorisme Internasional	Diarahkan kepada orang asing dan aset – aset asing Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi di suatu negara Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan – kebijakan pemerintah asing
Terorisme transnasional	Jaringan global yang bertujuan membentuk tatanan dunia baru dengan cara revolusi global. terorisme transnasional adalah bentuk radikal dari terorisme internasional.

Pola serangan teroris di Indonesia juga memiliki perbedaan. Dahulu kelompok JI yang berafiliasi dengan Al – Qaeda musuh yang mereka targetkan adalah *far enemy* atau musuh jauh dan kini kelompok JAD yang

berafiliasi dengan IS menargetkan *near enemy*.³⁵ Hal ini dapat dipahami karena IS membangun model terorisme baru yakni “oto terorisme”.³⁶ Jika terorisme Al – Qaeda mengarah keluar atau *faenemy* yaitu menargetkan keluar yaitu anti barat, menargetkan tentara, warga, atau kepentingan asing khususnya Amerika sedangkan oto terorisme IS atau terorisme ke dalam atau *near enemy* menargetkan tentara atau umat muslim yang berbeda keyakinan dan ideologi dengan mereka.³⁷ Hal ini dapat dilihat dari pola serangan jaringan Al – Qaeda dan jaringan IS seperti pada Bom Bali I yang menewaskan warga negara asing, penyerangan kedubes AS, dan pemboman hotel JW Marriot yang dianggap sebagai simbol – simbol barat. Perbedaan terletak juga pada kombatan yang dahulu semuanya adalah laki – laki sedangkan kini perempuan dan anak – anak ikut menjadi kombatan. Penggunaan perempuan dan anak-anak menurut pengamat teroris Adhe Bakti dilegitimasi oleh kelompok ISIS karena tengah terdesak dan tidak punya cara lain lagi dan kesulitan mencari pelaku laki – laki. Selain itu penggunaan perempuan dan anak-anak dalam aksi teror oleh kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS dianggap dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terornya.³⁸

³⁵ CNN Indonesia, *Perbedaan Pola Jihad dan Sepak Terjang Teroris di Indonesia* (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517194034-20-299072/perbedaan-pola-jihad-dan-sepak-terjang-teroris-di-indonesia> diakses 28 Agustus 2018)

³⁶ Haidar Assad, *opcit*, hal: 135 - 136

³⁷ *ibid*

³⁸ CNN Indonesia, *ibid*

